

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA OTONOMI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP PDRB DI KAB/KOTA PROVINSI PAPUA

Ade Rosita Dwi Anwar¹⁾, M. Faisal Abdullah²⁾, Syamsul Hadi³⁾

Abstract This study aims to see the development of local revenue, special autonomy funds and capital expenditure of each Kota District in Papua Province. And see the effect of Local Revenue, special autonomy fund and capital expenditure to Gross Regional Domestic Product of Regency / City of Papua Province. The analysis tool used is multiple regression with panel data during the period of 2011-2015. Result of research with selected model Fixed Effect Model show that variable of original revenue area have positive and significant effect with coefficient equal to 0.076579, Special Autonomy Fund have positive and significant influence with coefficient equal to 0.077388, Capital Expendancy has negative and significant effect with coefficient equal to -0.023542. while the value of the coefficient of determination is 0.822726 Or 82%, it indicates that the ability of variable local revenue, special autonomy fund and capital expenditure in explaining the gross regional domestic product of 82%.

keywords: Gross regional domestic product, local revenue, special autonomy fund and capital expenditure

Abstrak Penelitian ini guna dalam melihat perkembangan dari pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal setiap Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Dan melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel selama kurun waktu 2011-2015. Hasil penelitian dengan model terpilih *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0.076579, Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0.077388, Belanja Modal berpengaruh negative dan signifikan dengan koefisien sebesar -0.023542. sedangkan nilai koefisien determinasi adalah 0.822726 Atau 82%, ini menunjukkan bahwa kemampuan variable pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal dalam menjelaskan produk domestik regional bruto sebesar 82%.

kata kunci : Produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal

Pendahuluan

Paradigma perekonomian dalam suatu Daerah ataupun Negara bisa dilihat bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting atau bersifat multidimensial yang berdasarkan dalam perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap atau perilaku hidup masyarakat dan perubahan kelembagaan nasional. Pembangunan juga dapat meliputi perubahan pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. (Arifin, 2012). Selain itu juga sebagai indikator dalam menentukan suatu keberhasilan dalam sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat diartikan atau diumpamakan sebagai alat ukur dalam berkembangnya perkembangan peningkatam perekonomian dalam Wilayah ataupun Negara dimana adanya keterkaitannya dengan suatu aktivitas masyarakat dalam meningkatkan produksi barang dan jasa (Hadi, 2016). “Peningkatan tersebut diharapkan memberikan *trickle down effect* sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengukuran pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan produk domestik bruto (PDB) riil

¹[Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [rositaade085@gmail.com]

²[Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [abdullahfaisal57@yahoo.co.id]

³ [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [syam_umm@yahoo.com]

sedangkan untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi di suatu daerah digunakan produk domestik regional bruto (PDRB riil)” (Rizal, 2013)

Produk domestik regional bruto provinsi Papua mengalami kenaikan selama pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2011-2015 dimana kenaikan tersebut berbeda dengan keadaan masyarakat Papua sendiri yang dapat menyatakan bahwa kinerja ekonomi suatu daerah tersebut masih tergolong tidak sempurna yang masih belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam Produk Domestik Regional Brutonya walaupun Produk Domestik Regional Bruto sendiri bukan hal tunggal indikator dalam pembangunan, terdapat beberapa Factor-faktor lain yang mendukung atau indicator dalam suatu pembangunan sendiri (“BPS,” 2015)

Adanya Otonomi di suatu daerah diawali dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemimpin daerah dan UU No.25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mana kemudian diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Salah satu upaya yang harus ditegakkan dalam rangka mengembangkan otonomi daerah yang benar benar lebih riil dan komitmen adalah aspek pengelolaan keuangan daerah (Pemendagri, 2009). Desentralisasi fiskal memberikan banyak kewenangan pada daerah guna menggali potensi yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan suatu daerah tersebut. Adapun tujuannya yakni untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan public (Sudarti, 1998).

Delegasi otoritas dan tata kelola keuangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk meningkatkan ekonomi sesuai dengan potensinya. Melalui fleksibilitas manajemen keuangan diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pelayanan public dan aktifitas ekonomi (Kusuma, 2013). Peran Pemimpin daerah sendiri guna menjalankan anggaran pendapatan belanja daerah dengan tanpa mengabaikan goyahan ketidaktepatan politik ekonomi daerah yang terjadi di akhir-akhir tahun ini, selain itu pemimpin daerah sendiri juga sebagai penggerak pertama dalam menggerakkan perekonomian guna menstabilkan ke posisi sebelum krisis (Soelistyo, 2014). Sedangkan keinginan atau kebutuhan masyarakat yang bertambah menajak akan mengakibatkan dan memaksa pemimpin daerah guna berupaya dalam menambah atau melonjaknya daerah dengan diberikan kepedulian pada berkembangnya pertumbuhan ekonomi suatu daerahnya. Selain itu guna meningkatkan pelayanan public pemimpin daerah harus dapat mengalokasikan dananya dengan berbentuk belanja modal yang berguna untuk menambah asset tetap lainnya (Wulan, 2013)

Berubahnya pengalokasian belanja yang digunakan untuk program perbaikan atau pengembangan berbagai fasilitas umum. Pemimpin harus mensupport macam-macam kegiatan untuk berguna dalam meningkatkan ekonomi, salah satunya dengan membuka peluang dalam berinvestasi untuk parainvestor. Pengembangan infrastruktur dan penyediaan macam-macam fasilitas dipergunakan dalam meningkatkan daya tarik investasi. Perkembangan infrastruktur industry memiliki dampak yang riil dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah juga akan mempengaruhi pembangunan suatu daerah tersebut (Avicenna, 2015). Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar sama dengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan penerimaan asli yang diterima jadi jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali potensi daerahnya sebesar-besarnya (Nuarisa, 2013).

Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal atau komponen dalam realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah, semakin meningkatnya belanja modal maka akan berdampak pula pada tingkat produktifitas perekonomiannya. Perkembangan yang terus menerus untuk pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja dalam membiayai kegiatan pembangunan suatu pertumbuhan ekonomi selain belanja modal yang dapat mengukur tingkat kemandirian atau pertumbuhan ekonomi yakni adanya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Otonomi Khusus dimana Dana Otonomi Khusus diperuntukan untuk Provinsi Papua guna untuk bersaing dengan Provinsi lainnya (Yani, 2002)

Di masa otonomi daerah dimana mendapatkan perhatian yang khusus pada Provinsi Papua melalui dana otsus, dapat menjadikan peluang besar pada pimpinan daerah provinsi papua mengenai pembiayaan pembangunan manusia serta mensejahterakan masyarakat. Sehingga diharapkan mampu untuk mengatasi keterbelakangan provinsi papua dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Papua sendiri merupakan Provinsi yang memiliki luas sekitar 808,105 km dan mempunyai 29 Kabupaten / Kota dimana dengan banyaknya kabupaten kota dan di dukung oleh sumberdaya atau potensi yang dimiliki seharusnya dapat memaksimalkan guna bersaing dengan provinsi lainnya. Kemampuan yang dimaksud yakni kemampuan yang dimiliki daerah dalam proses pembangunan yang meliputi sumber daya manusia, kemampuan dalam meningkatkan sumber pendapatan yang akan diterima serta di tambah dengan provinsi papua sendiri yang mempunyai jumlah kabupaten/kota yang cukup besar yang secara administrative termasuk kedalam pemerintahan provinsi papua yang seharusnya dapat menjadikan provinsi papua menjadi lebih baik, melainkan kondisi riil yang dicapai masih atau

kurang menampakan yang berbuah kepuasan dalam proses mencapai suatu tujuan pembangunan.

Provinsi Papua merupakan Provinsi yang masih banyaknya masyarakat yang kurang sejahtera atau masih lemahnya Pembangunan Ekonominya dimana Provinsi Papua sendiri belum mampu untuk bersaing dengan Provinsi Lainnya sehingga Pimpinan Pusat memberikan dana otonomi khusus pada Provinsi Papua guna dapat bersaing dengan Provinsi Lainnya, tetapi kenyataannya berbeda bahwasanya Provinsi Papua sendiri masih kurang mampu untuk mengolah dana tersebut dengan baik karena masih adanya penyalahgunaan dalam Anggaran selain itu Masyarakat Papua kurang memanfaatkan Sumber Daya Alam sendiri atau minimnya teknologi atau infrastruktur yang memadai di Provinsi Papua, selain itu Provinsi Papua merupakan Provinsi terkaya di Indonesia dengan luasnya tiga kali lipat luas Pulau Jawa ,ditambah dengan Jumlah Penduduk yang sedikit dan masih banyaknya Hutan Perkebunan atau Potensi Daerah yang belum di gali .

Dengan itu diharapkan dari kesemuaan tempat harus memaksimalkan komponen komponen yang mana dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal dapat menjadi sebuah tolak ukur pendanaan daerah dalam hal memperbaiki atau meningkatkan Perekonomian suatu Daerahnya serta menjadi motivasi bagi suatu daerah tersebut untuk menggali kemampuan yang dimiliki dan meningkatkan kemandirian pendanaan daerah. Bertitik dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana perkembangan dan pengaruh pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap pdrb di kab/kota provinsi papua.

Menurut (Nur, 2015) yang melakukan penelitian di Provinsi Papua dengan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple regresi* Model analisis regresi menggunakan regresi biasa data 5 tahun yakni 2009-2013. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t statistik kurang dari nilai alpha 0,05 berarti signifikan atau H_0 diterima. dengan hasil pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap produk domestik regional bruto. Sedangkan menurut (Hariyadi, 2014) melakukan penelitian di Provinsi Bali. Merupakan menggunakan analisis jalur (*Path analysis*). Adapun hasilnya adalah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Jadi Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan

signifikan secara langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Adapun relevansi / keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pengembangan dimana pada penelitian terdahulu yakni penelitian (Nur, 2015) Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2009-2013 sedangkan kesamaan variabel dari Penelitian Terdahulu dengan yang sekarang yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto. dimana terdapat variabel lain dan tahun yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terdapat variabel Belanja Modal yang mana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel tersebut dan penelitian ini menggunakan tahun 2011-2015.

Produk Domestik Bruto sendiri yakni nilai dari suatu barang dan jasa dimana dihasilkan dalam suatu Negara dengan jangka waktu setahun tertentu dalam mempergunakan faktor produksi milik warga dan penduduk di Negara lainnya (Sukirno, 2004). Pendapatan asli daerah sendiri merupakan pendapatan daerah yang berasal dari suatu potensi daerah tersebut atau bersumber dari hasil pajak retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Yani, 2002). Dana Otonomi Khusus adalah dana yang di peruntukan untuk daerah yang mempunyai kriteria khusus seperti Papua yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Provinsi Papua (Yani, 2002). Sedangkan belanja modal yakni pengeluaran yang di peroleh untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode tertentu (Halim, 2004).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna dalam melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan di gunakan lokasi penelitian di Kabupaten / Kota Provinsi Papua yakni tahun 2011-2015 berupa data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Provinsi dalam angka, serta beberapa sumber lain yang relevan. Cakupan data dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Belanja Modal yang berada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, serta PDRB atas dasar harga konstan, Periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah antara tahun 2011-2015 Kabupaten/Kota di provinsi Papua dengan populasi sampel menggunakan populasi 28 Kabupaten dan 1 kota dengan metode sampel yakni sensus atau seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk variabel dependennya yakni Produk Domestik Regional Bruto (Y) serta variabel independennya

yakni Pendapatan Asli Daerah (X1) , Dana Otonomi Khusus (X2) dan Belanja Modal (X3), selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan data panel yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota pada Provinsi Papua. Selanjutnya untuk melihat atau dapat mengestimasi parameter dengan panel dapat menggunakan beberapa model yakni common effect, fixed effect dan random effect selain itu untuk mendapatkan model terbaik dalam penelitian ini menggunakan uji chow dan hausman, setelah model terbaik terpilih dilakukan uji t, uji f dan koefisien determinasi (Winarno, 2007). Sehingga dapat dilihat model yang digunakan dalam metode data panel berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)

β_0 = Konstanta Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (Jutaan rupiah)

X_2 = Dana Otonomi Khusus (Jutaan rupiah)

X_3 = Belanja Modal (Jutaan rupiah)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = eror (residual) R^2

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan produk domestik regional bruto bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Papua mengalami tingkat Fluktuatif setiap tahunnya yakni naik turunnya tingkat Pertumbuhan Ekonomi dimana naik turunnya Pertumbuhan Ekonomi ini di akibatkan oleh beberapa factor. Sehingga dapat kita lihat bahwa Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi sendiri dari Tahun 2011 hingga 2015 di Kabupaten / Kota Provinsi Papua berada pada Kabupaten Mimika dengan nilai sebesar 53,343.800 atau -0.08 dimana Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten yang memang Cukup makmur dan beruntung dimana masyarakatnya sendiri atau Sumber daya Manusianya cukup dapat memanfaatkan Potensi Daerahnya, Teknologi yang memadai serta adanya Faktor-faktor yang lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika tersebut. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terendah dari tahun 2011 hingga 2015 di Provinsi Papua berada pada Kabupaten Yalimo dengan nilai sebesar 497,600 atau -0.11 dimana Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten yang kurang memanfaatkan sumber daya alamnya dan kurang adanya teknologi dimana akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonominya serta kurang memanfaatkan atau factor lemahnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan dan kesenjangan sosial.

Selain itu Pertumbuhan Ekonomi sendiri di Provinsi Papua dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam menentukan suatu kebijakan yang tepat maka pemerintah daerah harus mampu menggali potensi keuangannya sendiri yakni bersumber dari pendapatan daerah (Oktavina, 2004). Perkembangan Pendapatan Asli daerah Provinsi Papua mengalami tingkat fluktuatif pada setiap tahunnya yakni pada tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pendapatan asli daerah Pada tahun 2011 hingga 2015 di Kabupaten / Kota Provinsi Papua dalam tabel diatas bahwa Rata-rata Pendapatan Asli daerah dari tahun 2011 hingga 2015 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Provinsi Papua berada pada Kabupaten Mimika dengan jumlah sebesar 200,154. Dimana Kabupaten Mimika atau Timika yang masih kerap muncul, timika sendiri merupakan ibukota kabupaten mimika yang terletak di provinsi papua dimana di wilayah pegunungan papua beroperasi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia , dengan demikian kabupaten mimika merupakan kabupaten yang cukup makmur atau beruntung dibandingkan Kabupaten lainnya di Indonesia sehingga Kabupaten yang mana banyak potensi daerahnya atau banyaknya pertambangan di Kabupaten Mimika menghasilkan tingkat Pendapatan Asli Daerah tertinggi, selain itu Kabupaten Mimika berkaitan dengan perekonomian.

Pendapatan daerah Total terendah berada pada Kabupaten Mamberamo Tengah dengan alokasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,714, dimana di Kabupaten Mamberamo Tengah masih minimnya atau kurang mengolah suatu potensi daerahnya sendiri dimana banyaknya masyarakat yang tidak memnfaatkan sumber daya alam. Jadi semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut . Selain itu Pendapatan Asli Daerah sendiri di Provinsi Papua dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan setiah tahunnya.

Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua mengalami tingkat fluktuatif pada setiap tahunnya yakni pada tahun 2011 hingga 2015, dana otonomi khusus Pada tahun 2011 hingga 2015 di Kabupaten / Kota Provinsi Papua yang telah dijabarkan dalam tabel diatas bahwasanya rata - rata Dana Otonomi Khusus dari tahun 2011 hingga 2015 dengan jumlah Dana Otonomi Khusus tertinggi di Provinsi Papua berada pada Kabupaten Jayawijaya sebesar 112,755, dimana kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten yang terletak di pegunungan dan tempat strategis untuk perdagangan sehingga dibutuhkan dana yang cukup besar agar masyarakat Kabupaten Jayawijaya mampu bersaing dengan Kabupaten lainnya.

Dana Otonomi Khusus dari tahun 2011 hingga 2015 terendah berada pada Kabupaten Deiyai sebesar 62,610. Secara teoritis pembangunan di dalam suatu pemerintahan suatu daerah guna melakukan percepatan suatu pembangunan. Harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana otonomi khusus oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai komponen pembangun di suatu daerah di tunjukkan oleh sejauh mana daerah tersebut mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Selain itu alokasi Belanja Modal sendiri di Provinsi Papua dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perkembangan Belanja Modal Provinsi Papua mengalami tingkat fluktuatif pada setiap tahunnya yakni 2011 hingga 2015, Belanja Modal Kabupaten yang mendapatkan alokasi belanja modal tertinggi dan terendah dalam tabel rata-rata Belanja Modal Kabupaten / Kota di Provinsi Papua yang telah dijabarkan dalam tabel di atas bahwasanya rata-rata Belanja Modal dari tahun 2011 hingga 2015 dengan jumlah Alokasi Belanja Modal tertinggi di Provinsi Papua berada pada Kabupaten Merauke dengan jumlah sebesar 476,017, dimana Kabupaten Merauke merupakan Kabupaten terluas yang berupaya untuk keluar dari keterisolasiannya dengan perekonomian yang termasuk berkembang dengan adanya kapal-kapal yang memuat kebutuhan pokok penduduk dan adanya transaksi perdagangan antara penduduk dengan Negara Tetangga selain itu Kabupaten Merauke juga membangun infrastruktur berakibatkan Tingginya Belanja Modal untuk infrastruktur yang digunakan dalam jangka panjang.

Belanja Modal dari tahun 2011 hingga 2015 terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 136,990, jadi semakin tinggi alokasi Belanja Modal tersebut berarti pula dengan banyaknya tingkat kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskalnya di Daerah sehingga Kabupaten Merauke mendapatkan alokasi Belanja Modal dengan tingkat tertinggi dari pada Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Papua. Selain itu alokasi Belanja Modal sendiri di Provinsi Papua dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya

Berdasarkan hasil regresi menggunakan Eviews diketahui bahwa estimasi menggunakan Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Akan tetapi estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect dikarenakan dari hasil uji chow dan hausman menyatakan bahwa model terbaiknya yakni fixed effect dengan probability sebesar > 0.05 .

Tabel 1
Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect

Variable	Coefficient	Prob
C	7877.436	0.0093
PAD	0.076579	0.0495
OTSUS	0.077388	0.0002
BELANJA MODAL	-0.023542	0.0045

Sumber : Data Sekunder diolah (Eviews, 2018)

Dilihat dari tabel 1 hasil regresi data panel bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Papua jika diasumsikan nilai variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal adalah nol ditentukan oleh besarnya nilai intercept, nilai intercept pada model fixed effect adalah 7877.436. ini berarti jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal bernilai nol maka akan menaikkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 7877436%.

Untuk memilih model data panel yang sesuai di gunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam estimasi pengaruh antar variabel. Dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut ini yakni hasil uji chow :

Tabel 2
Uji Chow

Cross-section F	
Statistic	2.76555
d.f.	0.0001
Prob.	0.0001

Sumber : Data Sekunder diolah (Eviews, 2018)

Dilihat dari tabel 2 hasil uji chow diperoleh Prob. F = 0.0001. nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 . Dengan demikian dapat dihasilkan bahwa model terpilihnya yakni Fixed Effect Model yang lebih tepat digunakan dari pada Common Effect Model. Selanjutnya yakni dapat dilihat dalam tabel uji hausman dibawah berikut ini :

Tabel 3
Uji Hausman

Cross-section random	
Statistic	27.751603
d.f.	3
Prob.	0.0000

Sumber : Data Sekunder diolah (Eviews, 2018)

Dari hasil tabel 3 uji hausman bahwa probabilitasnya menunjukkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. dapat dikatakan bahwa model *fixed*

effect lebih sesuai digunakan. Sehingga dapat disimpulkan dari model yang terbaik yakni berada pada model *fixed effect* dimana metode Uji chow dan Hausman model terbaiknya yakni *Fixed Effect* atau dapat juga dilihat bahwasanya nilai *Chi-Square statistic* adalah 27.751603 dengan nilai *Chi-Square* tabel pada d.f (3) dengan $\alpha = 5\%$ atau 0.05 yakni 7.81 sehingga nilai *Chi-Square statistic* > dengan *Chi Square tabel*, maka H_0 ditolak, sehingga model data panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya yakni dapat dilihat dalam tabel 4 hasil uji t dibawah berikut ini :

Tabel 4
Hasil Uji t

variabel	coefficient	prob.
c	7877.44	0.0093
PAD	0.07658	0.0495
OTSUS	0.07739	0.0002
BELANJA MODAL	-0.0235	0.0045

Sumber : Data Sekunder diolah (Eviews, 2018)

Dimana Variabel pendapatan asli daerah mempunyai probability sebesar 0.0495 dan koefisiennya sebesar 0.076579 yang artinya berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto, selanjutnya yakni variabel dana otonomi khusus mempunyai probability sebesar 0.0002 dan koefisiennya sebesar 0.077388 yang berarti berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional brutonya, yang terakhir yakni belanja modal dimana mempunyai probability sebesar 0.0045 dengan tingkat koefisiennya sebesar -0.023542 yang artinya mempunyai pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Selanjutnya yakni dapat dilihat dalam tabel 5 hasil uji f dibawah berikut ini :

Tabel 5
Uji F-statistik

R-squared	0.822726
Prob(F-statistic)	0.0000

Sumber : Data Sekunder diolah (Eviews, 2018)

Dimana dapat dilihat dalam model berikut ini :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

$$R^2 = 0.822726$$

$$K = 3$$

$$N = 145$$

$$F_{hitung} = \frac{0.822726/3}{(1-0.822726)/(145-3-1)}$$

$$F_{hitung} = \frac{0.274242}{(0.177274)/(141)}$$

$$F_{hitung} = \frac{0.274242}{0.001257}$$

$$F_{hitung} = 218.17183770$$

Nilai $df_1 = k - 1 = 2$, dan $df_2 = n - k = 29 - 3 = 26$, pada $\alpha = 5$ persen (0.05) diperoleh Nilai $F_{hitung} = 218.17183770$ $F_{tabel} = 3.37$, maka dapat disimpulkan $F_{hitung} = 218.17183770 > F_{tabel} = 3.37$ dan dari hasil regresi yang dapat dilihat dalam lampiran 9 pada halaman 102 dimana diperoleh nilai F-statistik 0.000000. pada tingkat keyakinan 5% atau 0.05, bisa dilihat bahwa yang dihasilkan yakni lebih kecil atau kurang dari (< 0.05) yang artinya menolak H_0 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa minimal satu atau semua variable berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Selanjutnya yakni dapat dilihat dalam tabel uji 6 uji R-Square dibawah berikut ini :

Tabel 6
Nilai Uji R-Square Provinsi Papua

R-squared	0.822726
-----------	----------

Sumber : Data Sekunder diolah (Eviews, 2018)

Dari hasil pengolahan data dalam tabel 6 hasil uji R-Square dapat dilihat bahwa koefisien determinasinya yakni sebesar 0.822726 hal ini terlihat bahwa 82.27% produk domestik regional bruto pada Kabupaten dan Kota Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal sedangkan 17.73% variable pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional brutonya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian yakni berupa perkembangan dan pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto dengan tingkat signifikansi sebesar kurang dari 0.05 atau sebesar 5% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Bahwa Perkembangan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pendapatan asli daerah tertinggi berada pada Kabupaten Mimika sedangkan terendah berada pada Kabupaten Mamberamo Tengah selain itu Berdasarkan estimasi yang telah dihasilkan bahwa pendapatan asli daerah sendiri berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi atau produk domestik regional bruto dengan tingkat signifikansi 5% dimana nilai Probability $< 0,05$ yakni 0,0495 dan nilai koefisiennya sebesar 0.076579 yang

berarti bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 76.579 rupiah.

2. Dana Otonomi Khusus

Bahwa Perkembangan Dana Otonomi Khusus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan Dana Otonomi Khusus tertinggi berada pada Kabupaten Jayawijaya sedangkan terendah berada pada Kabupaten Deiyai selain itu Berdasarkan estimasi yang telah dihasilkan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan serta positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi atau produk domestic regional bruto dengan tingkat signifikansi 5% dimana nilai Probability $< 0,05$ yakni 0.0002 dan koefisiennya yakni sebesar 0.077388 yang berarti bahwa apabila Dana Otonomi Khusus meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 77.388 rupiah.

3. Belanja Modal

Bahwa Perkembangan Belanja Modal mengalami peningkatan setiap tahunnya dan Belanja Modal tertinggi berada pada Kabupaten Merauke sedangkan terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Yapen selain itu Berdasarkan estimasi yang telah dihasilkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan serta negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi atau produk domestic regional bruto dengan tingkat signifikansi 5% dimana Probability nya $< 0,05$ yakni 0.0045 dan koefisiennya adalah sebesar -0.023542 yang berarti bahwa apabila berupa Belanja Modal meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar -23.542 rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2012). Analisis Perbandingan Perekonomian pada Empat Koridor di Propinsi Jawa Timur. *ekonomi pembangunan, VOL.5 NO.2*.
- Avicenna, H. S. (2015). ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015, *15(1)*, 1.
- BPS. (2015).
- Eviews. (2018). data diolah.
- Hadi, S. (2016). Pengaruh investasi, Pengeluaran Pemerintah & Tenaga Kerja terhadap PDRB Kab/kota Provinsi banten tahun 2010-2014. *ekonomi pembangunan, Vol.14 No.*, 11.
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah* (1 ed.). JAKARTA: erlangga.
- Hariyadi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *ekonomi pembangunan*.
- Kusuma, H. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *ekonomi*

- pembangunan*, Vol.9 No.1, 1–11.
- Nuarisa. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *media ekonomi*, 4.
- Nur, Y. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto, 2(1), 32–42.
- Oktavina, D. (2004). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH : PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL, 10, 2.
- Pemendagri, I. (2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 39 T*.
- Rizal. (2013). No Title. *Pengaruh investasi, tenaga kerja dan desentralisasi terhadap PDRB di kabupaten di Indonesia tahun 2007-2010*.
- Soelistyo, A. (2014). Analisis Flypaper Effect Pad dan Dau terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2014. *ekonomi pembangunan*, Vol.14 No., 122–231.
- Sudarti. (1998). Otonomi Daerah dan Pola Hubungan Keuangan Pusat Daerah. *ekonomi pembangunan*, 1–71.
- Sukirno, S. (2004). *Ekonomi Pembangunan proses masalah dan dasar kebijakan*. Jakarta: karisma putra utama.
- Winarno, W. (2007). *analisis ekonometrika dan statistik dengan E-views*. Yogyakarta: BPFE.
- Wulan, F. (2013). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK/BUKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2011. *ekonomi pembangunan*.
- Yani, A. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: erlangga.